



Rekonstruksi Kelembagaan Politik Pasca- Demo Pembubaran DPR- Tinjauan Atas Krisis Institusional dan Perlawanan Sipil di Tahun 2025

Hendri Suwarsono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

*Penulis Korepondensi: hendrisuwarsono@ugj.ac.id

Abstract. *Demonstrations demanding the dissolution of the House of Representatives by 2025 highlight a crisis of public trust and serve as a key moment in Indonesia's political landscape. These protests have not only symbolic significance but also lead to elite repositioning, the temporary dismissal of several members, and the cessation of policy that increased benefits. This study examines how the crisis has prompted political institutional reconstruction and the role of civil society in influencing change. A descriptive qualitative approach was used, including literature studies, analysis of academic literature, official documents, and media reports. The findings indicate that actions by the House of Representatives, such as the rotation of Commission III leadership, member deactivation, and rejection of benefit increases, were primarily reactive to public pressure. The discussion reveals that while these actions reduce crisis escalation, they are cosmetic and do not address structural issues like legislative accountability and budget transparency. In conclusion, the 2025 protests provide an opportunity for civil society to engage politically outside elections, but the institutional changes made are short-term. Fundamental reform can only occur if civil movements remain consistent and if political parties and the government commit to reform.*

Keywords: *Civil Society; DPR; Indonesian Democracy; Institutional Reconstruction; Political Crisis.*

Abstrak. Demonstrasi yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2025 menyoroti krisis kepercayaan publik dan menjadi momen penting dalam lanskap politik Indonesia. Protes ini tidak hanya memiliki makna simbolis tetapi juga menyebabkan reposisi elit, pemberhentian sementara beberapa anggota, dan penghentian kebijakan yang meningkatkan tunjangan. Studi ini meneliti bagaimana krisis tersebut telah mendorong rekonstruksi kelembagaan politik dan peran masyarakat sipil dalam memengaruhi perubahan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan, termasuk studi literatur, analisis literatur akademis, dokumen resmi, dan laporan media. Temuan menunjukkan bahwa tindakan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rotasi kepemimpinan Komisi III, penonaktifan anggota, dan penolakan kenaikan tunjangan, terutama bersifat reaktif terhadap tekanan publik. Diskusi mengungkapkan bahwa meskipun tindakan-tindakan ini mengurangi eskalasi krisis, tindakan tersebut bersifat kosmetik dan tidak mengatasi masalah struktural seperti akuntabilitas legislatif dan transparansi anggaran. Kesimpulannya, protes 2025 memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk terlibat secara politik di luar pemilihan umum, tetapi perubahan kelembagaan yang dilakukan bersifat jangka pendek. Reformasi mendasar hanya dapat terjadi jika gerakan sipil tetap konsisten dan jika partai politik dan pemerintah berkomitmen terhadap reformasi.

Kata Kunci: Demokrasi Indonesia; DPR; Krisis Politik; Masyarakat Sipil; Rekonstruksi Kelembagaan.

1. LATAR BELAKANG

Demonstrasi besar pada Agustus–September 2025 mengguncang fondasi politik Indonesia dan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sorotan tajam (Dwi, 2025). Gelombang protes tidak berhenti pada seruan moral, melainkan berkembang menjadi tuntutan serius untuk membubarkan lembaga legislatif (CNN Indonesia, 2025). Situasi ini memaksa DPR dan partai-partai politik mengambil langkah cepat guna mengurangi eskalasi krisis. Rekonstruksi kelembagaan politik kemudian muncul dalam bentuk rotasi jabatan, penonaktifan anggota, serta pengendalian tunjangan (Asharani, 2025).

Masyarakat sipil menilai DPR kehilangan legitimasi karena terlalu jauh dari kepentingan publik. Rasa ketidakpercayaan diperkuat oleh gaya komunikasi sebagian anggota dewan yang dianggap meremehkan protes (Prihatini, 2025). Respon spontan dari masyarakat berupa mobilisasi massa, aksi unjuk rasa, serta kampanye digital menegaskan adanya kekuatan sipil yang mampu menekan institusi politik. Reaksi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak semata-mata ditentukan melalui mekanisme elektoral lima tahunan, tetapi juga melalui partisipasi langsung masyarakat dalam mengontrol lembaga negara.

Perubahan struktural paling awal terlihat dalam pergantian pimpinan Komisi III DPR. Ahmad Sahroni, yang semula menjabat wakil ketua, digeser dari posisinya melalui surat resmi Fraksi Partai NasDem. Kursi pimpinan kemudian dialihkan kepada Rusdi Masse Mappasessu. Pergantian ini terjadi setelah pernyataan Sahroni terkait aksi demonstrasi menuai kritik luas dan dianggap memperburuk citra parlemen (Detik, 2025). Rotasi ini menunjukkan bahwa partai politik menggunakan mekanisme internal kelembagaan untuk meredam tekanan publik, meski perubahan tersebut lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Dinamika berikutnya berupa pemberhentian sejumlah anggota DPR oleh partai mereka masing-masing. Empat anggota—Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, Nafa Urbach dari NasDem, serta Adies Kadir dari Golkar—dinonaktifkan dari keanggotaan fraksi. Status nonaktif tersebut otomatis menghentikan akses terhadap fasilitas dan tunjangan legislatif. Alasan yang diberikan partai berkisar pada menjaga citra organisasi dan menghindari dampak negatif dari pernyataan maupun tindakan politik yang kontroversial (Detik, 2025). Keputusan ini memperlihatkan bagaimana kelembagaan partai memainkan peran sentral dalam menegakkan disiplin internal sekaligus merespons tuntutan masyarakat sipil.

Tuntutan publik mengenai tunjangan anggota DPR juga menjadi titik tekan utama. Gelombang kritik menolak kenaikan tunjangan dan fasilitas tambahan bagi legislator. Sebagai bentuk akomodasi, partai-partai besar seperti NasDem, PAN, dan Golkar menyatakan kesepakatan bahwa anggota nonaktif tidak lagi berhak menerima gaji maupun tunjangan. Golkar bahkan menegaskan bahwa status nonaktif harus diikuti konsekuensi finansial nyata agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat (KompasTV, 2025). Keputusan ini mencerminkan bagaimana tekanan sipil mampu memengaruhi kebijakan finansial lembaga legislatif, meskipun implementasi jangka panjang masih menjadi pertanyaan.

Ketiga peristiwa tersebut memperlihatkan pola rekonstruksi kelembagaan politik yang bersifat responsif dan reaktif. Rotasi pimpinan komisi, pemberhentian anggota oleh partai, dan penghentian kenaikan tunjangan menunjukkan adanya upaya cepat untuk meredam krisis

(Janati, Prabowo, & Tim Redaksi Kompas.com, 2025). Namun, perubahan struktural yang terjadi belum menyentuh dimensi lebih mendasar seperti mekanisme akuntabilitas legislatif, sistem representasi politik, atau transparansi pengelolaan anggaran. Dengan kata lain, rekonstruksi kelembagaan pasca-demo masih terbatas pada penyesuaian simbolik yang diarahkan untuk menenangkan opini publik (Putra, 2025).

Reaksi masyarakat sipil terhadap langkah-langkah tersebut bercampur antara apresiasi dan kekecewaan. Sebagian kalangan menilai keputusan menghentikan tunjangan anggota nonaktif merupakan langkah progresif yang jarang terjadi sebelumnya. Namun, tidak sedikit yang berpendapat bahwa pergantian personalia dan penonaktifan anggota hanya bentuk kosmetik tanpa reformasi struktural nyata (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025). Kekecewaan publik terlihat dari kelanjutan aksi protes di sejumlah daerah, meski skalanya mulai menurun setelah tuntutan finansial dipenuhi.

Fenomena ini penting dikaji karena menggambarkan interaksi antara lembaga politik dan masyarakat sipil dalam situasi krisis (Hadinata, 2025). DPR sebagai institusi formal menghadapi ujian legitimasi yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat sipil menunjukkan kapasitas untuk memengaruhi kebijakan melalui tekanan kolektif, sementara partai politik terpaksa melakukan penyesuaian kelembagaan meski bersifat sementara (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2025). Dalam perspektif kelembagaan, respons tersebut menggambarkan rekonstruksi yang cenderung bersifat adaptif, bukan transformasional.

Studi ini berupaya menelaah rekonstruksi kelembagaan pasca-demo dengan menempatkan tiga dinamika utama yaitu pergantian pimpinan Komisi III, penonaktifan anggota DPR, dan akomodasi tuntutan finansial sebagai fokus analisis. Penelitian menilai sejauh mana perubahan tersebut berkontribusi pada perbaikan legitimasi, bagaimana masyarakat sipil memengaruhi arah perubahan, serta apakah langkah-langkah tersebut dapat dikategorikan sebagai reformasi struktural atau hanya tindakan simbolis.

Pemahaman atas dinamika ini penting bukan hanya bagi kajian politik Indonesia, tetapi juga bagi wacana demokrasi kontemporer secara lebih luas. Peristiwa 2025 memberikan gambaran konkret bahwa krisis legitimasi dapat memicu rekonstruksi kelembagaan secara cepat, namun keberlanjutannya bergantung pada apakah reformasi tersebut dilanjutkan pada level institusional yang lebih dalam. Dengan demikian, analisis ini diharapkan memberi kontribusi akademis bagi diskursus mengenai masa depan kelembagaan politik Indonesia dan peran masyarakat sipil dalam menjaga demokrasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika perubahan struktural dalam kelembagaan politik DPR-RI serta respons masyarakat sipil tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian bergantung pada pemaknaan terhadap informasi yang tersedia dalam berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel.

Data dalam penelitian ini bersumber dari sumber sekunder, meliputi literatur akademik seperti buku dan artikel jurnal, dokumen resmi DPR-RI serta partai politik, dan pemberitaan media cetak maupun daring yang memuat laporan mengenai pergantian posisi di DPR-RI dan dinamika politik terkait. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai bahan utama untuk membangun pemahaman konseptual dan memperoleh fakta empiris yang mendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi temuan, dan interpretasi berdasarkan teori kelembagaan politik serta masyarakat sipil. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari literatur akademik, dokumen resmi, dan laporan media. Meskipun tidak menggunakan data primer seperti wawancara atau observasi, penelitian tetap memiliki kekuatan analitis melalui pemanfaatan sumber sekunder yang beragam dan kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergantian Pimpinan Komisi III DPR-RI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa demonstrasi pembubaran DPR tahun 2025 memicu serangkaian perubahan kelembagaan di tubuh parlemen. Pergantian pimpinan Komisi III DPR-RI menjadi langkah awal yang diambil partai politik untuk meredam eskalasi krisis. Rotasi ini dilakukan terhadap Ahmad Sahroni, yang digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu, setelah pernyataannya dinilai memperburuk citra lembaga. Meskipun langkah tersebut menegaskan mekanisme kontrol internal partai, publik menilai perubahan ini lebih merupakan reposisi elit politik daripada upaya reformasi substantif terhadap mekanisme kerja legislatif.

Temuan berikutnya berkaitan dengan pemberhentian sementara sejumlah anggota DPR oleh partainya masing-masing, antara lain Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Adies Kadir. Status nonaktif tersebut secara otomatis menghentikan akses terhadap fasilitas dan tunjangan legislatif. Tindakan ini memperlihatkan dominasi partai dalam mengatur disiplin internal serta penegakan citra organisasi. Namun, dalam perspektif kelembagaan, keputusan tersebut lebih menegaskan loyalitas anggota DPR kepada partai politik ketimbang pada

konstituen. Hal ini menimbulkan perdebatan publik mengenai kualitas demokrasi internal partai dan independensi legislatif di Indonesia.

Selain itu, tuntutan publik terkait penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR berhasil diakomodasi melalui kebijakan partai-partai besar yang menghentikan pembayaran gaji maupun fasilitas bagi anggota nonaktif. Keputusan ini dipersepsikan sebagai simbol keberpihakan DPR terhadap masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa langkah ini lebih bersifat reaktif dan kosmetik karena tidak disertai reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran legislatif. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa rekonstruksi kelembagaan pasca-demo 2025 masih terbatas pada respons jangka pendek yang diarahkan untuk menenangkan opini publik, bukan perubahan fundamental dalam sistem politik Indonesia.

Pergantian Ahmad Sahroni dari kursi Ketua Komisi III DPR-RI menjadi salah satu peristiwa penting yang menandai adanya pergeseran kekuasaan di tubuh parlemen pasca-demo pembubaran DPR (Lubabah, 2025). Posisi strategis ini sebelumnya dipandang sebagai simbol keseimbangan antara kepentingan partai politik dan fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap sektor hukum dan keamanan. Rotasi pimpinan tersebut menunjukkan bahwa DPR berusaha memberikan sinyal adanya perubahan arah kebijakan internal (Octavia, Setuningsih, & Tim Redaksi Kompas.com, 2025). Namun, di sisi lain, langkah ini lebih merefleksikan strategi konsolidasi politik elit dibandingkan reformasi kelembagaan yang substantif.

Publik merespons pergantian ini dengan skeptis. Banyak kalangan menilai bahwa rotasi jabatan hanya sebatas reposisi elit tanpa menyentuh akar persoalan berupa lemahnya transparansi dan akuntabilitas legislatif. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan personel, struktur kerja DPR tetap dipersepsikan tidak mengalami pembaruan signifikan.

Pemberhentian Sementara Empat Anggota DPR-RI oleh Partai

Langkah tegas partai politik yang memberhentikan sementara empat anggota DPR-RI dari keanggotaan fraksi masing-masing menjadi momentum lain yang menarik perhatian (Ady, 2025). Tindakan ini dipandang sebagai mekanisme disiplin internal partai terhadap kader yang dianggap tidak sejalan dengan garis politik organisasi (RO, 2025).

Dalam perspektif kelembagaan, peristiwa ini menegaskan dominasi partai politik atas parlemen. Independensi legislatif menjadi terbatas karena loyalitas anggota DPR lebih banyak diarahkan kepada partai ketimbang pada konstituen (Hasbi, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa rekonstruksi kelembagaan tidak hanya bergantung pada aturan formal DPR, tetapi juga pada budaya politik yang menempatkan partai sebagai aktor sentral.

Dampaknya, pemberhentian tersebut menimbulkan perdebatan publik mengenai kualitas demokrasi internal partai. Sebagian pihak menilai langkah itu sebagai bukti ketegasan dan konsistensi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pembungkaman aspirasi individu anggota legislatif.

Penolakan Kenaikan Tunjangan DPR-RI

Salah satu tuntutan massa yang diakomodasi adalah penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR-RI (Polda Malut, 2025). Keputusan ini dimaksudkan untuk meredakan ketegangan politik dan mengurangi kemarahan publik terhadap parlemen.

Secara kelembagaan, penolakan kenaikan tunjangan diproyeksikan sebagai simbol keberpihakan DPR pada kondisi masyarakat yang sedang mengalami tekanan ekonomi. Namun, langkah tersebut lebih bersifat kosmetik daripada substantif. Tidak ada reformasi menyeluruh mengenai transparansi anggaran atau mekanisme pengawasan penggunaan keuangan negara (Shabrina, 2025).

Meski demikian, keputusan ini memperlihatkan bahwa tekanan masyarakat sipil mampu memaksa lembaga legislatif melakukan penyesuaian kebijakan. Hal ini memperkuat argumen bahwa legitimasi DPR sangat dipengaruhi oleh opini publik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

Peran Eksekutif dalam Krisis Kelembagaan

Krisis kepercayaan terhadap DPR tidak hanya menjadi urusan legislatif, tetapi juga menuntut respons dari eksekutif (Suriadi, 2025). Presiden dan Kabinet mengambil langkah hati-hati dalam menyikapi gelombang demonstrasi. Sejumlah pernyataan resmi yang dikeluarkan menekankan pada pentingnya stabilitas nasional serta komitmen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme politik yang konstitusional.

Peran eksekutif dalam situasi ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga jarak agar tidak terlihat mencampuri urusan internal DPR. Di sisi lain, Kabinet dituntut memastikan bahwa gejolak politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan (Ari Wibowo et al., 2025). Strategi komunikasi politik eksekutif menjadi instrumen utama dalam meredam eskalasi, termasuk melalui imbauan dialog serta penyusunan agenda bersama lintas partai.

Dalam kerangka rekonstruksi kelembagaan, posisi eksekutif sangat penting karena berpotensi mendorong reformasi legislatif melalui kebijakan bersama. Namun, tanpa komitmen nyata pada agenda transparansi dan akuntabilitas, peran eksekutif hanya berhenti pada level manajemen krisis jangka pendek.

Rekonstruksi Kelembagaan Politik Pasca-Demo

Ketiga peristiwa di tubuh DPR pergantian pimpinan Komisi III, pemberhentian anggota oleh partai, dan penolakan kenaikan tunjangan ditambah dengan peran eksekutif, membentuk dinamika baru dalam kelembagaan politik Indonesia. Rekonstruksi kelembagaan pasca-demo masih berada dalam tahap awal, dengan karakteristik lebih bersifat responsif ketimbang proaktif (Rikil, 2025).

Analisis terhadap perkembangan ini menunjukkan bahwa DPR berusaha menjaga legitimasi melalui rotasi elit dan kebijakan populis, sementara partai politik memperkuat posisi mereka sebagai pengendali internal. Eksekutif berperan sebagai penyeimbang dengan menekankan stabilitas (Fodhi et al., 2024). Namun, semua langkah ini belum menyentuh aspek struktural seperti reformasi aturan main, peningkatan transparansi, atau penguatan mekanisme checks and balances.

Dengan demikian, rekonstruksi kelembagaan yang terjadi pasca-demo lebih tepat disebut sebagai penataan ulang kosmetik daripada perubahan fundamental. Hal ini memperlihatkan keterbatasan kapasitas institusi politik dalam merespons tuntutan reformasi secara mendalam.

Respons Masyarakat Sipil

Gelombang demonstrasi besar yang terjadi sepanjang tahun 2025 menegaskan peran masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam mengawal perubahan kelembagaan politik (Basyari, 2025). Tuntutan yang muncul dari jalanan, mulai dari desakan pembubaran DPR hingga penolakan kenaikan tunjangan, berhasil memengaruhi arah kebijakan.

Masyarakat sipil menunjukkan bahwa legitimasi institusi politik tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada penerimaan publik. Gerakan mahasiswa, organisasi non-pemerintah, komunitas profesional, hingga kelompok masyarakat lokal berkontribusi menciptakan tekanan kolektif yang tidak dapat diabaikan oleh elit politik (Habibah, 2023).

Dalam perspektif jangka panjang, respons masyarakat sipil menjadi faktor penentu apakah rekonstruksi kelembagaan akan terus berlanjut atau berhenti pada perubahan superfisial. Jika masyarakat sipil tetap konsisten melakukan pengawasan, peluang terjadinya reformasi struktural semakin terbuka. Sebaliknya, apabila energi gerakan melemah, kemungkinan besar DPR dan partai politik akan kembali pada pola lama yang minim akuntabilitas.

Dengan demikian, reaksi masyarakat sipil pasca-demo bukan hanya sekadar catatan tambahan, tetapi menjadi elemen penutup yang memperlihatkan hubungan timbal balik antara lembaga politik dan rakyat. Demokrasi tidak berhenti pada institusi formal, melainkan terus hidup melalui partisipasi kritis warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Demo pembubaran DPR tahun 2025 mencerminkan krisis kepercayaan publik yang mendorong perubahan politik signifikan, terlihat dari reposisi elite seperti pergantian Ketua Komisi III dan pemberhentian sementara empat anggota DPR, serta diakomodasinya beberapa tuntutan massa termasuk pembatalan kenaikan tunjangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mekanisme koreksi politik di Indonesia masih berlangsung meski bersifat reaktif, sementara partisipasi publik berkembang menjadi mobilisasi kolektif yang mampu memengaruhi kebijakan. Untuk memperkuat legitimasi dan mencegah krisis serupa, DPR perlu membangun mekanisme akuntabilitas yang transparan dan berbasis kinerja, sedangkan partai politik harus memperkuat kontrol internal dan konsistensi etika organisasi. Pemerintah dan DPR juga perlu menyediakan kanal komunikasi formal dengan masyarakat sipil agar aspirasi tersalurkan tanpa perlu mobilisasi besar, diiringi dorongan bagi masyarakat untuk menjaga partisipasi berkelanjutan melalui forum advokasi serta penguatan pendidikan politik agar publik memahami cara demokratis dalam mengawal dan memengaruhi kebijakan.

DAFTAR REFERENSI

- Ady, T. D. A. (2025, August 31). 5 anggota DPR dinonaktifkan, dari Eko Patrio sampai Adies Kadir. *Hukumonline*.
- Ari Wibowo, A. R. D., R. H., & E. D. S. (2025). Dinamika pembentukan Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan good governance: Zaken kabinet vs kabinet pragmatis. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(1).
- Asharani, L. (2025, September 5). 5 anggota DPR dinonaktifkan pasca demo, ini daftarnya. *VIVA.co.id*.
- Basyari, I. (2025, September 7). Panasea politik untuk patah hati publik kepada DPR. *Kompas*.
- CNN Indonesia. (2025, August 25). Demo 25 Agustus, massa mahasiswa serukan DPR dibubarkan. *CNN Indonesia*.
- Dwi, I. (2025, September 9). Demo 9 September 2025: BEM UI desak 17+8 tuntutan rakyat ke DPR. *UMJ*.
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya pemisahan kekuasaan dalam mempertahankan pemerintahan yang seimbang. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(3), 26-37. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>
- Habibah, P. (2023). Peran gerakan sosial dalam transformasi politik: Tinjauan atas pemogokan dan aksi massa. *Literacy Notes*, 1(2), 45-56.
- Hasbi, S. M. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang larangan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari fungsionaris partai politik perspektif siyasah dusturiyah [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].

- Janati, F., Prabowo, D., & Tim Redaksi Kompas.com. (2025, September 5). Pimpinan DPR setuju pemberhentian gaji dan tunjangan Sahroni-Uya Kuya Cs. *Kompas.com*.
- Lubabah, R. G. (2025, September 4). Begini alur penghentian gaji anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Nafa Urbach hingga Eko Patrio. *Liputan6.com*.
- Octavia, S., Setuningsih, N., & Tim Redaksi Kompas.com. (2025, August 30). Ahmad Sahroni dicopot dari kursi wakil ketua komisi hukum DPR dan alasannya. *Kompas.com*.
- Prihatini, E. S. (2025). DPR merespons kritik dengan menghina rakyat, tanda demokrasi makin mundur. *The Conversation*. <https://doi.org/10.64628/AAN.gspeum7d5>
- Putra, D. D. (2025). DPR jawab tuntutan 17+8. *Berita Nasional Update*.
- Rikil, A. (2025, September 13). Daftar anggota DPR RI mundur dan dinonaktifkan pasca-demo besar-besaran. *IDN Times*.
- RO. (2025, August 31). Partai NasDem nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari anggota DPR RI. *NasDem DPR RI*.
- Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Education and Religious Studies*, 1(1), 1-12.
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2025, September 4). Penonaktifan DPR hanya selamatkan citra parpol, bukan jawaban masalah bangsa. *LLDIKTI Wilayah V*.